



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja, yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi komitmen.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Salah satu bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan adalah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2016. Serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Bappeda Kota Balikpapan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berikut akan diuraikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2016, yang menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2016 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN



NINING SURTINGSIH

DARTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
	1.3 Aspek Strategis	2
	1.4 Struktur Organisasi	4
	1.5 Sistematika Penulisan	5
Bab II	Perencanaan Strategi dan Penetapan Kinerja	6
	2.1 Rencana Strategis	6
	2.1.1 Visi dan Misi	6
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran	6
	2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	8
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	9
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
	3.2 Realisasi Anggaran	16
Bab IV	Penutup	19
	4.1 Kesimpulan	19
	4.2 Saran	19

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan sebagai instansi Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2011-2016 dan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016 dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2016.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda Kota Balikpapan adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, fungsi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian;
- d. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penelitian;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

1.3 Aspek Strategis

Bappeda Kota Balikpapan sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Kota Balikpapan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kota maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dispenda dan Bagian Pembangunan;
- b. Penyusunan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016;
- d. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- e. Penyusunan Balikpapan Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan Manusia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Profil Ekonomi Daerah dan Publikasi Program/ kegiatan pembangunan;
- f. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis, Penyusunan Peta Nilai Zona Tanah 3D Kota Balikpapan, Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyaluran Air Minum dan Penyusunan Buku Putih dan Sistem Sanitasi Kota.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Balikpapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan *inkonsistensi* perencanaan pembangunan di daerah;
2. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
3. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

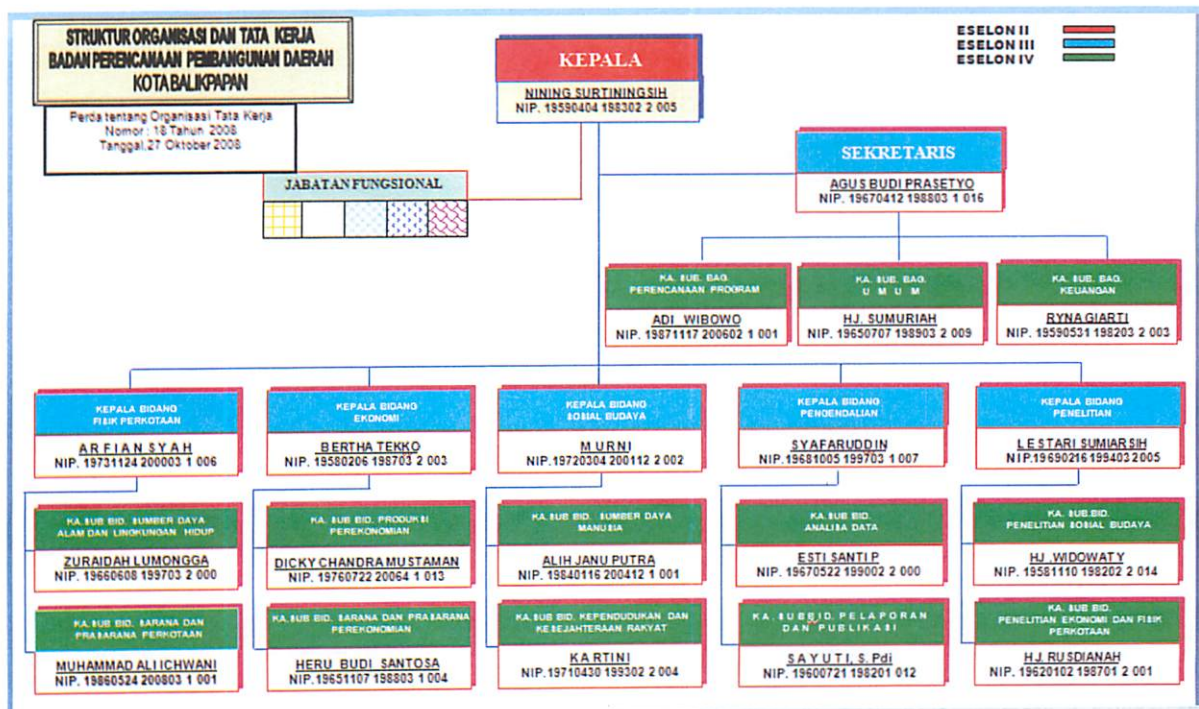
Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Telah ditetapkannya beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam produk hukum daerah;
2. SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Bappeda Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Balikpapan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 Sekretaris dan 5 Kepala Bidang. Struktur organisasi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab tersebut berisi latar belakang penyusunan LKJIP Bappeda Tahun 2016 dan profil Bappeda Kota Balikpapan yang meliputi tugas pokok dan fungsi, aspek strategis dan struktur organisasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan Renstra Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja; evaluasi akuntabilitas keuangan; analisis kinerja dan keuangan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dirangkum dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta saran tindak lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Bappeda Kota Balikpapan telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu *"Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni"*

Visi Bappeda Kota Balikpapan selaras dengan Visi jangka menengah Kota Balikpapan 2011-2016 yaitu : *"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman"* dan visi jangka panjang Kota Balikpapan 2005-2025, yaitu untuk *"Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman"*. Dalam keterkaitan dengan Visi Kota, maka segenap jajaran Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat diandalkan sebagai dasar dari arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Komitmen tersebut harus dimiliki dan disediakan oleh Bappeda Kota Balikpapan kepada para stakeholders sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya yaitu Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota;
2. Meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif dan responsif;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan kota
3. Terwujudnya hasil kegiatan kelitbangan yang berkualitas sesuai potensi dan kebijakan pembangunan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya data yang terintegrasi

2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif
3. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Balikpapan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data tergambar pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016	$\frac{\sum \text{Data Terinput dalam SIPD yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Data Terinput dalam SIPD}}$	Bid. Pengendalian
2.	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan SKPD}}$	Sekretariat
3.	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	$\frac{\sum \text{Nilai Capaian Misi}}{\sum \text{Misi}}$	Bid. Pengendalian
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Penelitian yang dilaksanakan}}$	Bid. Penelitian

2.2 PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan target pencapaian kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016	60%	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.591.232.218,-
2.	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-
3.	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3. Program Perencanaan Tata Ruang	2.349.349.836,-

Jumlah anggaran 2016 : Rp. 13.288.930.075,00

Program : 9 program

Perjanjian Kinerja tahun 2016 ini diambil dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2016. Perjanjian Kinerja ini telah dilakukan revisi dan perubahan sesuai dengan *review* atau peninjauan kembali pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, ditetapkan 4 sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Terwujudnya data yang terintegrasi
2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif
3. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2016 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut.

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Rasio	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Rasio
1	2	3	4	5 = (4/3)	6	7	8	9
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016	60%	60%	100%	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.591.232.218,-	1.496.109.942,-	94%
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	100%	96,49%	96,49%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-	2.436.004.901,-	73%
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%	96,25%	96,25%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-	2.436.004.901,-	73%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	2.349.349.836,-	2.167.353.453,-	93%

					3. Program Perencanaan Tata Ruang			
Rata - rata capain kinerja				98%				

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 13.288.930.075,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp. 11.991.486.613,00

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan amanat pembangunan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Capaian sasaran strategis Bappeda Kota Balikpapan tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2014	60%	60%	100%

Pada sasaran strategis yang pertama tingkat pencapaian keberhasilan diukur dengan indikator kinerja Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Bappeda Kota Balikpapan memiliki tanggungjawab dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan dengan melakukan perencanaan, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknisnya serta memiliki fungsi pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah.

Pengoordinasian pengelolaan data dan publikasi pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi utama Bappeda Kota Balikpapan dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan data berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, dengan mengintegrasikan data dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam satu sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD ini merupakan salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. Kegiatan ini berorientasi upaya penggalan database perencanaan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi program bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem informasi tersebut berbasis Website yang menyajikan data base pembangunan daerah Kota Balikpapan yang menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki Kota Balikpapan, data ini bersumber dari SKPD dan Kantor terkait yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016, Bappeda Kota Balikpapan dapat memenuhi target yang diharapkan. Dari 60% data yang ditargetkan terisikan dan termanfaatkan, terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah elemen data yang terisi terhadap jumlah data yang harus tersedia pada tahun 2016.

Sedangkan pada tahun 2015 target tidak terpenuhi secara maksimal dikarenakan banyaknya kendala dalam pengisian data SIPD menyebabkan persentase keterisian masih rendah, adapun kendalanya adalah susahnya pengumpulan data ke SKPD yang terkait sehingga dalam pengumpulan data tersebut agak sulit ini disebabkan karena belum adanya forum data di tingkat SKPD untuk dikoordinasikan dan disinkronisasikan.

Untuk meningkatkan keterisian data SIPD ini diharapkan pemerintah daerah membuat suatu kebijakan tentang SIPD seperti membuat payung hukum teknis dan mekanisme pengelolaan penyediaan dana, melakukan MoU dengan BPS dan instansi lain seperti BMG dan BPN, dimana Instansi tersebut sangat erat hubungannya dengan perkembangan yang ada di Kota Balikpapan.

Perbandingan Capaian Tahunan
Tahun 2015 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4		
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016	55%	54,46%	60%	60%

Tabel di atas merupakan gambaran pencapaian target pada tahun 2015 dan 2016, yang menunjukkan turunnya realisasi pencapaian target.

Pada sasaran strategis yang kedua yang pencapaian targetnya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja tersaji dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	100%	96,49%	96,49%

Keselarasn Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan tidak tercapai dipengaruhi oleh :

1. Kurang selarasnya antara jumlah program dan kegiatan antara dokumen rencana terhadap dokumen pelaksanaan (RKPD dan APBD)
2. Kurang selarasnya antara dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang diusulkan terhadap RKPD tahun berjalan.
3. Kurang dipedomannya Renstra SKPD sebagai dasar rencana kerja pada perangkat daerah.

Dengan tidak konsistennya perencanaan tahunan terhadap Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh SKPD. Untuk meningkatkan keselarasn dokumen perencanaan, maka perlu adanya peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan tahunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Renja terhadap Renstra SKPD, Restra SKPD terhadap RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan.

Perbandingan Capaian Tahunan
Tahun 2015 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasn Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	80%	96,10%	100%	96,49%

Keberhasilan sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya capaian kinerja dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan, hal ini tergambar dalam table berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN %
1	2	3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%	96,25%	96,25%

Tidak tercapainya kinerja RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, karena masih terdapat program pada misi 2, misi 3, misi 4 dan misi 6 yang belum tercapai dengan uraian sebagai berikut :

- a) Misi Ke-2 memiliki 17 program dengan kinerja 16 program sudah tercapai dan 1 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b) Misi Ke-3 memiliki 20 program dengan kinerja 17 program sudah tercapai dan 1 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- c) Misi Ke-4 memiliki 19 program dengan kinerja 17 program sudah tercapai dan 2 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- d) Misi Ke-6 memiliki 18 program dengan kinerja 16 program sudah tercapai dan 2 program belum tercapai. Program yang belum tercapai adalah Program Pengendalian Banjir dan Program Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perbandingan Capaian Tahunan
Tahun 2015 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4		
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	80%	91,25%	100%	96,25%

Untuk meningkatkan capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan, maka diperlukan penguatan sasaran beserta indikator kinerjanya untuk pencapaian misi pada RPJMD.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Tabel di atas merupakan sasaran strategis keempat yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah adalah Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti. Penelitian dan pengembangan yang dimaksud adalah dapat berupa penelitian, studi ataupun kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Balikpapan maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti adalah merupakan hasil yang direkomendasikan dari penelitian, studi ataupun kajian. Hasil dapat ditindaklanjuti oleh SKPD pelaksana kegiatan dan juga oleh SKPD lain yang terkait.

Pengukuran realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis keempat ini, dilakukan dengan menghitung jumlah penelitian, studi ataupun kajian yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditindaklanjuti pada tahun 2016.

Dengan tercapainya target capaian kinerja tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dari Bappeda kota Balikpapan dengan SKPD pelaksana teknis pada masa yang akan datang. Sehingga dalam menyusun kegiatan penelitian, studi ataupun kajian harus benar-benar mempertimbangkan manfaat serta SKPD mana yang akan menindaklanjutinya.

Perbandingan Capaian Tahunan
Tahun 2015 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4		
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80%	86%	100%	100%

Capaian realisasi pada tahun 2015 melebihi dari target yang ditentukan yaitu 80%, meskipun secara jumlah penelitian, studi ataupun kajian pada tahun 2014 adalah 14 kajian/studi dengan jumlah tindaklanjut sebanyak 12 kajian/studi. Peningkatan target capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 merupakan hasil dari upaya memanfaatkan hasil pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana mengalami perubahan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis Bappeda Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016 secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.976.818.463,- dari total Rp. 7.783.446.000,- atau mencapai 89,64%, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Balikpapan sebesar Rp. 13.288.930.075,00 dan terealisasi mencapai 90,24% atau sebesar Rp. 11.991.486.613,00. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, dari anggaran sebesar Rp. 6.088.239.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.608.763.231,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 479.475.769,- atau 92,12%;
- b. Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 4.646.389.575,- terealisasi sebesar Rp. 3.732.839.173,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 913.550.402,- atau 80,34%;
- c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 6.894.895.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.788.162.440,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 106.733.060,- atau 98,45%.

Pada tabel berikut disajikan capaian akuntabilitas keuangan pada masing-masing program/kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis pada tahun 2016 digambarkan pada table berikut:

**CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23 Tahun 2016	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.591.232.218,-	1.496.109.942,-	94,02
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-	2.436.004.901,-	72,75
eningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.348.639.021,-	2.436.004.901,-	72,75
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3. Program Perencanaan Tata Ruang 	2.349.349.836,-	2.167.353.453,-	92,25

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 4 (empat) pada tahun 2016 rata-rata mencapai 98%.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan kota Balikpapan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai 90,24% dari total Anggaran Belanja Langsung.

Sedangkan target yang belum tercapai secara maksimal salah satunya disebabkan karena belum adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selaras. Dengan adanya komitmen terhadap keselarasan serta konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka tidak akan ditemukan adanya program atau kegiatan yang muncul dalam usulan namun tidak tercakup dalam Renstra ataupun RPJMD.

Kurangnya pengawasan terhadap perencanaan sehingga program dan kegiatan dapat masuk pada dokumen sesudahnya, namun tidak ada termuat dalam dokumen sebelumnya.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

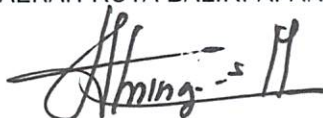
1. Untuk meningkatkan keterisian data SIPD ini diharapkan pemerintah daerah membuat suatu kebijakan tentang SIPD seperti membuat payung hukum teknis dan mekanisme pengelolaan penyediaan dana, melakukan MoU dengan lembaga atau instansi vertikal yang berada di kota Balikpapan, dimana instansi tersebut sangat erat hubungannya dengan perkembangan yang ada di Kota Balikpapan;
2. Perlu adanya petunjuk serta pendampingan dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja SKPD sehingga terdapat perencanaan yang terarah dan konsisten;
3. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah Kota Balikpapan, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan;
4. Serta sosialisasi, regulasi dan monitorisasi yang mengharuskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk menjamin integrasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindaklanjuti oleh Bappeda Kota Balikpapan ataupun SKPD teknis lainnya;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan *Stake Holder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kota Balikpapan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Balikpapan selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN



NINING SURTININGSIH

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (REVISI)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23/2014	60%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan sektor pembangunan	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 1.591.232.218,00	
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.348.639.021,00	
3.	Program Perencanaan tata Ruang	Rp. 284.122.222,00	
4.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.265.227.614,00	
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Rp. 800.000.000,00	

Balikpapan, 1 November 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN

RIZAL EFFENDI

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN


NINING SURTINGSIH

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT PERANGKAT DAERAH**

Unit Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23/2014	60%
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan sektor pembangunan	100%
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota : Balikpapan
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya data yang terintegrasi	Persentase data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sesuai urusan pada UU No. 23/2014	60%	60%	100%
2	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan responsif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan sektor pembangunan	100%	96,49%	96,49%
3	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan	100%	96,25%	96,25%
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 13.288.930.075,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 11.991.486.613,00